



**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)
TA 2023**

BKPSDM KAB. SOLOK

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II Tahun 2023.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca.

Tidak lupa ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini. Akhirnya kami berharap semoga Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok kedepan.

Arosuka, Juni 2023

KEPALA,



AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan RENJA BKPSDM dan Pencapaian RENSTRA BKPSDM s/d Triwulan II Tahun 2023	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok	20
Tabel 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023	23
Tabel 3.1	Pendanaan Indikatif	30
Tabel 3.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan perubahan terhadap dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan realisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan ke II. Dokumen Renja Perangkat Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja Perangkat Daerah memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun

2023. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ini merupakan tahun-tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2023. Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Program Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dengan hubungan keterkaitan sebagai berikut:

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023 mempedomani Misi No. 4 Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih” dengan rincian:

- Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berkualitas
- Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
- Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang Kapabel
- Indikator : Indeks Profesionalitas ASN

Sedangkan sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pada BAB VI tabel 6.3 Program prioritas yang pada BKPSDM adalah “Peningkatan Kualitas SDM ASN” sebagai berikut:

- Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tata Kelola Pemerintahan
- Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Keterangan : Pelatihan dan Diklat ASN, serta Beasiswa bagi ASN berprestasi

BKPSDM mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional BKN yang tersebar pada dua belas wilayah kerja. Ada sebanyak 7 sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara yang secara keseluruhan masih terdapat permasalahan Pelayanan di BKPSDM sehingga Penyusunan Renja tahun 2023 diharapkan dapat mendorong pelayanan BKPSDM agar bisa sejalan dengan sasaran strategis BKN.

Selain itu BKPSDM juga memiliki hubungan fungsional dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat “Meningkatnya kualitas pengelolaan Manajemen SDM Aparatur”. Penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 diselaraskan dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera Barat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Tahun 2021-2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
14. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.
15. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 selain dimaksudkan untuk menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Kabupaten Solok Tahun 2023 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi juga sebagai panduan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan Perangkat Daerah.

1.3.2 Tujuan

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;
- b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II TAHUN 2023

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan ke II tahun 2023 dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD serta Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE II
TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan ke II tahun 2023

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Pada Tahun 2023 anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok adalah sebesar Rp.41.911.848.444,- dan terealisasi sebesar Rp. 12.426,481,166.- (29,65%) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 38.656.588.435,- Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai serta Tambahan Penghasilan PNS dan realisasinya sebesar Rp. 10.109.165.513 atau 26,15%.
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.115.613.394,- Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program dan 39 (tiga puluh Sembilan) sub kegiatan, dengan realisasi sebesar Rp.946.144.550,- atau 30,37 %.

Berikut juga disajikan capaian Indikator Kinerja BKPSDM sampai dengan triwulan II sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN” dengan beberapa indikator kinerja yaitu:
 - a. Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan
Target indikator kinerja untuk tahun 2023 ditetapkan 68% dengan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 92,82%. Rasio ini didapat dari data jumlah pejabat eselon II, III dan IV yang mengisi jabatan dibagi dengan jumlah jabatan eselon II, III dan IV yang ada

di Kabupaten Solok yaitu sebanyak 353 orang dengan total jabatan 371 jabatan. Sampai triwulan II target indikator kinerja sudah berhasil dicapai oleh BKPSDM

b. Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN

Target indikator kinerja untuk tahun 2023 ditetapkan 5% dengan realiasi sampai dengan triwulan II sebesar -0,02 % dihitung berdasarkan komponen jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diputuskan ditahun 2023 sebesar 6 kasus dengan total pegawai per desember 2022 sebanyak 4832 pegawai dikurangi dengan jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diputuskan ditahun 2022 sebesar 7 kasus dengan total pegawai 4832. Hasil pengurangan tahun n dan tahun n-1 tersebut dikalikan 100%.

c. Persentase data kepegawaian yang akurat

Target indikator kinerja untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 98%. Secara total Persentase data kepegawaian yang akurat baru dapat dihitung pada akhir tahun 2023, namun sampai dengan triwulan II proses pemutakhiran data pegawai di lingkungan pemerintah kabupaten solok sudah mencapai 65%, proses ini berlangsung pada aplikasi SIMPEG yang dalam proses sinkronisasi dengan aplikasi SI-ASN.

d. Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian.

Target indikator kinerja untuk tahun 2023 adalah 3,65. Indeks kepuasa aparatur terhadap layanan kepegawaian didapat dari laporan Survey Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan pada triwulan ke IV setiap tahunnya, oleh karena itu angka capaian SKM sampai triwulan II masih menggunakan angka akhir tahun 20222 yaitu sebesar 3,41.

2. Sasaran Strategis “ Meningkatkan kompetensi aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan” dengan Indikator Kinerja “Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)”

Target Indikator Kinerja untuk tahun 2023 adalah sebesar 65%. Pengukuran kinerja untuk indikator ini secara umum dilakukan pada akhir tahun yang di dapat dari jumlah pejabat structural dan fungsional

selain guru dan nakes yang memiliki sertifikat kompetensi dibagi dengan total PNS selain guru dan nakes. Sampai dengan triwulan II masih memakai angka akhir tahun 2022 yaitu sebesar 36,25%

3. Sasaran Strategis “ Meningkatkan tata Kelola Organisasi” dengan Indikator Kinerja “ Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja”

Target Indikator untuk tahun 2023 adalah sebesar 84. Nilai ini adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022. Sampai dengan triwulan II nilai SAKIP tahun 2022 belum diberikan oleh Inpektorat Daerah Kabupaten Solok sehingga realisasi yang diberikan adalah nilai evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021 yaitu sebesar 77,95

Sedangkan untuk capaian indikator kinerja Program dan Kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Indikator Kinerja Program adalah Persentase Penempatan Aparatur sesuai Kompetensi dengan target 68% dan capaian program sampai dengan triwulan II sebesar 51,06%. Sedangkan untuk indikator kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Indikator Kinerja : Persentase Kesesuaian Formasi dengan ketersediaan PNS

Target: 90%

Realisasi Triwulan II: 53%

- b. Mutasi dan Promosi ASN

Indikator Kinerja: Persentase kesesuaian Kompetensi dengan jabatan

Target: 74%

Realisasi Triwulan II: 55%

- c. Pengembangan Kompetensi ASN

Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian

Target: 100%

Realisasi Triwulan II: 50%

- d. Penilaian dan evaluasi Kinerja Aparatur

Indikator Kinerja: Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur

Target: 100%

Realisasi Triwulan II: 46,25%

2. Program Pengembangan Sumber Daya manusia

Indikator Kinerja Program adalah Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) dengan target 50% dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 60%. Sedangkan Indikator Kinerja untuk kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Indikator Kinerja: Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional

Target: 100%

Realisasi Triwulan II: 60%

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Indikator Kinerja Program adalah Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan dengan target 100% dan realisasi sampai dengan triwulan II sebesar 51,66%. Sedangkan Indikator Kinerja untuk kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja: Cakupan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah

Target: 100%

Realisasi Triwulan II: 52,29%

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja: Cakupan dokumen keuangan yang tersedia

Target: 100%

Realisasi Triwulan II: 40%

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Indikator Kinerja: Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Target: 290 orang

Relisasi Triwulan II: 162 orang

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Indikator Kinerja: Persentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran

Target: 100%

Relisasi Triwulan II: 41%

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja: Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Target: 100%

Relisasi Triwulan II: 55%

f. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja: Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik

Target: 100%

Relisasi Triwulan II: 55%

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023
BPSDM Kabupaten Solok

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)				Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan												
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)											
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)		9	10=(5+7+9)	11=(10/4)											
5	UNSUBSIDIARIS	UNSUBSIDIARIS																				
5	03	KEPEGAWAIAN			21.499.329.739			14.238.776.852		15.652.818.516												
5	03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	(1). Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja (2). Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (3). Persentase pengadaan/pemeliharaan barang milik daerah	(1). 100% (2). 100% (3). 100%	17.707.848.633	(1). 100% (2). 100% (3). 100%	17.707.848.633	(1). 100% (2). 100% (3). 100%	8.331.937.714	13.484.027.267	244%	95%	27.432.683.442	58.358.929.534	329,57%						
5	03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Cakupan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	118.980.000	100%	118.980.000	100%	183.053.500	176.516.223	171%	92%	193.564.087	489.060.310	411,04%					
5	03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan SKPD yang disusun	2	22.448.000	2	Dokumen	22.448.000	2	Dokumen	6.060.000	2	Dokumen	5.522.800	100%	91,14%	6.060.000	34.030.800	151,60%
5	03	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	1	1.480.000	1	Dokumen	1.480.000	1	Dokumen	6.664.500	1	Dokumen	6.496.500	100%	97,48%	6.664.500	14.641.000	989,26%
5	03	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-P SKPD yang disusun	1	1.472.000	1	Dokumen	1.472.000	1	Dokumen	5.644.000	1	Dokumen	4.540.000	100%	80,44%	5.644.000	11.656.000	791,85%
5	03	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang disusun	1	900.000	1	Dokumen	900.000	1	Dokumen	1.192.000	1	Dokumen	1.192.000	100%	100,00%	1.192.000	3.284.000	364,89%
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA-P SKPD yang disusun	1	1.956.000	1	Dokumen	1.956.000	1	Dokumen	6.080.000	1	Dokumen	5.183.800	100%	85,26%	6.080.000	13.219.800	675,86%
5	03	01	2.02	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun	2	78.380.000	2	Dokumen	78.380.000	2	Dokumen	154.448.000	12	Dokumen	150.931.123	600%	97,72%	164.958.587	394.269.710	503,02%
5	03	01	2.02	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja SKPD yang disusun	4	12.344.000	4	Dokumen	12.344.000	4	Dokumen	2.965.000	4	Dokumen	2.650.000	100%	89,38%	2.965.000	17.959.000	145,49%

5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat akurasi dalam pengelolaan keuangan SKPD	100%	17.063.565.668	100%	17.063.565.668	100%	7.556.031.000		12.667.561.955	907%	163%		26.679.317.226	56.410.444.849	330,59%
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ketersediaan gaji dan tunjangan ASN selama 1 tahun	14	17.060.177.468	14 bulan	17.060.177.468	14 bulan	7.552.300.000	353 ORANG/ BULAN	12.661.171.955	2521%	167,65%		26.675.586.226	56.396.935.649	330,58%
5	03	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang disusun sesuai aturan yang berlaku	1	2.343.000	1 Dokumen	2.343.000	1 Dokumen	2.184.000	1 Dokumen	4.843.000	100%	221,75%		2.184.000	9.370.000	399,91%
5	03	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun sesuai aturan yang berlaku	1	1.045.200	1 Dokumen	1.045.200	1 Dokumen	1.547.000	1 Dokumen	1.547.000	100%	100,00%		1.547.000	4.139.200	396,02%
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	31.967.500		31.967.500		99.282.000		115.718.000	215%	49,38%		86.279.800	233.965.300	731,88%
5	03	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparatur BKPSDM yang memperoleh pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	3	0		0		25.140.000	43 orang	79.105.000	0%	0,00%		12.140.000	0	0,00%
5	03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang kepegawaian	130	31.967.500	130 orang	31.967.500	130 orang	74.142.000	280 ORANG	36.613.000	215%	49,38%		74.139.800	142.720.300	446,45%
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	233.539.585	100%	233.539.585	100%	229.395.850		254.426.202	67%	132%		197.959.300	685.925.087	293,71%
5	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	9	3.337.235	9 jenis	3.337.235	9 jenis	2.288.850	2 PAKET	1.425.000	22,2%	62,3%		2.288.850	7.051.085	211,29%
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	9	70.895.000	9 unit	70.895.000	9 unit	48.000.000	6 PAKET	41.403.000	66,7%	86,3%		26.423.450	138.721.450	195,67%
5	03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor	30	28.976.750	30 jenis	28.976.750	30 jenis	15.479.500	4 PAKET	23.603.500	13,3%	152,5%		15.479.500	68.059.750	234,88%
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7	15.593.600	7 paket	15.593.600	7 paket	8.182.000	12 PAKET	18.832.000	171,4%	230,2%		8.182.000	42.607.600	273,24%
								20016 lembar		20016 lembar				0,0%						
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	60	114.737.000	60 orang	114.737.000	60 orang	131.784.000	37 LAPORAN	169.162.702	61,7%	128,4%		121.924.000	405.823.702	353,70%
								30 kali		30 kali										
								5 kali		5 kali										

5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22.545.200	100%	22.545.200	100%	22.974.364		17.052.251	3%	74%		20.047.179	59.644.630	264,56%
5	03	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang disediakan	100	1.000.000	100 lembar	1.000.000	100 lembar	2.100.000	1 LAPORAN	1.000.000	1%	47,62%		2.100.000	4.100.000	410,00%
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan air, listrik dan telepon yang dibayar	36	19.745.200	36 tagihan	19.745.200	36 tagihan	19.074.364	24% tagihan	14.252.251	1%	74,72%		16.147.179	50.144.630	253,96%
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tagihan retribusi sampah yang dibayar	12	1.800.000	12 tagihan	1.800.000	12 tagihan	1.800.000	1 LAPORAN	1.800.000	8%	100,00%		1.800.000	5.400.000	300,00%
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang berfungsi dengan baik	100%	237.250.680	100%	237.250.680	100%	241.201.000		252.752.636	100%	59%		255.515.850	479.889.358	202,27%
5	03	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya							2 unit	131.327.808	100%	100,00%		134.302.000	265.629.808	#DIV/0!
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan untuk 4 unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	4	167.100.000	2 unit	167.100.000	2 unit	129.000.000	2 unit	69.819.520	100%	54,12%		70.021.250	306.940.770	183,69%
5	03	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi 1 unit gedung kantor	1	48.602.680	1 unit	48.602.680	1 unit	69.150.000	1 unit	44.680.308	100%	64,61%		44.092.600	137.375.588	282,65%
5	03	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/ rehabilitasi 3 jenis sarana dan prasarana gedung kantor	12	21.548.000	12 unit	21.548.000	12 unit	43.051.000	12 unit	6.925.000	100%	16,09%		7.100.000	35.573.000	165,09%
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	(1). Tingkat kepuasan PNS terhadap pelatihan administrasi kepegawaian (2). Persentase ASN yang berkembang karir (3). Indeks Profesionalitas ASN (4). Persentase ketersediaan data ASN	(1). 3,60 (2). 70% (3). 50% (4). 100%	2.240.401.576	(1). 3,60 (2). 70% (3). 50% (4). 100%	2.240.401.576	(1). 3,60 (2). 70% (3). 50% (4). 100%	7.100.000	(1). 3,60 (2). 70% (3). 50% (4). 100%	1.076.775.249	640%	39%		1.042.038.900	4.259.215.725	190,11%
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	854.668.976	100%	854.668.976	100%	748.957.000		324.563.603	76%	61%		299.208.300	1.378.440.879	161,28%
5	03	02	2.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan	Jumlah calon ASN yang lulus sesuai formasi	90	531.107.976	90 orang	531.107.976	90 orang	88.457.000	4 DOKUMEN	103.602.767	4%	117,12%		83.917.000	718.627.743	135,31%
						Jumlah PPPK yang lulus sesuai formasi				346 orang	346 orang									
5	03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SKKP dan SK Pensiun yang diterbitkan	251	72.935.000	251 orang	72.935.000	251 orang	150.250.000	348 DOKUMEN	70.883.899	139%	47,18%		71.591.400	215.410.299	295,35%
5	03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terlaksananya fasilitasi kelembagaan profesi ASN	0	-		-		250.000.000	1 LEMBAGA	50.000.000				50.000.000		
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data pegawai yang dimutakhirkan	5.473	185.735.000	5.473 orang	185.735.000	5.473 orang	150.250.000	4.832 orang	43.671.650	88%	29,07%		40.478.000	269.884.650	145,31%
5	03	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah ASN yang difasilitasi pengurusan identitas kepegawaiannya	200	64.891.000	200 orang	64.891.000	200 orang	110.000.000	145 orang	56.405.287	73%	51,28%		53.221.900	174.518.187	268,94%

5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	75%	1.106.110.800	75%	1.106.110.800	75%	1.222.912.950	75%	590.344.666	2326%	41%		591.017.000	2.287.472.466	206,80%
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah keputusan ASN yang diterbitkan	2.500	197.416.800	2.500 orang	197.416.800	2.500 orang	367.500.000	1.091 orang	104.461.203	44%	28,42%		137.832.200	439.710.203	222,73%
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah ASN yang mengikuti ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	50	166.250.000	130 orang	166.250.000	130 orang	205.412.950	1070 orang	57.078.008	823%	27,79%		106.664.000	329.992.008	198,49%
						Jumlah usulan kenaikan pangkat yang diproses	700		850 orang		850 orang		0 orang							
5	03	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Seleksi JPT Pratama	3	742.444.000	8 orang	742.444.000	8 orang	650.000.000	489 orang	428.805.455	6113%	65,97%		346.520.800	1.517.770.255	204,43%
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%	49.916.800		49.916.800		150.000.000		25.498.700	158%	17,00%		33.958.500	109.374.000	219,11%
5	03	02	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah penerbitan keputusan tentang pengangkatan, pemberhentian dan kenaikan dalam jabatan fungsional	300	49.916.800	300 SK	49.916.800	300 SK	150.000.000	474 SK	25.498.700	158%	17,00%		33.958.500	109.374.000	219,11%
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur	100%	229.705.000		229.705.000		410.130.000		136.368.280	0%	38,45%		117.855.100	483.928.380	210,67%
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah PNS yang menerima penghargaan Saytalencana Karyasatya	400	51.421.350	200 orang	51.421.350	200 orang	133.402.500	0 orang	51.297.275	0%	38,45%		50.752.800	153.471.425	298,46%
								400 orang		400 orang		0 orang		0%						
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase kasus pelanggaran disiplin yang ditangani	100	178.283.650	100 %	178.283.650	100 %	276.727.500	16 LAPORAN	85.071.005	16%	30,74%		67.102.300	330.456.955	185,35%
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			1.551.079.530		1.551.079.530		5.899.739.138		1.092.016.000	15%	18,51%		1.000.000	2.644.095.530	170,47%
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat	70%	1.551.079.530	70%	1.551.079.530	70%	5.899.739.138	70%	1.092.016.000	15%	18,51%		1.000.000	2.644.095.530	170,47%
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase kelulusan ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	100%	1.551.079.530	100%	1.551.079.530	100%	5.899.739.138	100%	1.092.016.000	15%	18,51%		1.000.000	2.644.095.530	170,47%
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah peserta Diklat PBJ sebanyak 20 orang	20	1.551.079.530	20 orang	1.551.079.530	20 orang	5.899.739.138	3 LAPORAN	1.092.016.000	15%	18,51%		1.000.000	2.644.095.530	170,47%
						Jumlah Calon PNS yang mengikuti Latsar sebanyak 98 orang	98		98 orang		98 orang									
								21.499.329.739		21.499.329.739		14.238.776.852		15.652.818.516				28.475.722.342	65.262.240.789	303,55%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun 2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKPSDM Kabupaten Solok belum memiliki standar pelayanan minimal bagi kegiatan bidang kepegawaian. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja pelayanan organisasi.

Berikut pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Solok:

1. Pelayanan Internal

Pelayanan internal yang diselenggarakan Sekretariat BKPSDM bersifat koordinasi dan fasilitasi seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di BKPSDM, diantaranya:

a. Pelayanan Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, Forum PD, RKA, DPA, RDPPA, DPPA, LKIP, LKPJ, LPPD dan Monev.
- Pelayanan gaji dan TPP, pencairan anggaran dan SPJ, laporan keuangan, CalK, neraca dan LRA.

b. Pelayanan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- Pelayanan administrasi surat menyurat (masuk dan keluar);
- Pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, KPE, Taspen, Konversi NIP, KGB, Kenaikan Pangkat, SKUMPTK dan pensiun PNS internal BKPSDM;
- Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

2. Pelayanan Eksternal

Pelayanan eksternal BKPSDM dilaksanakan oleh bidang-bidang. Pelayanan ini mengacu pada tupoksi BKPSDM sebagai unsur pelaksana urusan kepegawaian di daerah. Pelayanan ini menyangkut seluruh PNS yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Solok.

a. Pelayanan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Subbidang Pengembangan Pegawai Fungsional Tertentu;

- Pelayanan jabatan fungsional tertentu.

Subbidang Pengembangan Pegawai Struktural dan Fungsional Umum

- Pelayanan mutasi dan perpindahan dalam dan luar daerah
- Pelayanan baperjakat dan pelantikan pejabat
- Pelayanan Tugas dan Ijin Belajar

Subbidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

- Pelayanan informasi diklat
- Pelayanan penyelenggaraan diklat

b. Pelayanan pada Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan

Subbidang Kepangkatan

- Pelayanan kenaikan pangkat pegawai
- Pelayanan Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas.

Subbidang Data dan Informasi

- Pelayanan data dan informasi kepegawaian (SIMPEG)
- Pelayanan bezeting pegawai

Subbidang Formasi dan Pengadaan

- Pelayanan informasi seleksi penerimaan calon ASN.
- Pelayanan peningkatan status CPNS menjadi PNS dan sumpah PNS

c. Pelayanan pada Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian Subbidang Pembinaan

- Pelayanan penyelesaian kasus-kasus pegawai
- Pelayanan SKP online

Subbidang Kesejahteraan

- Pelayanan Taspen, Karis, Karsu, Karpeg, Konversi NIP
- Pelayanan Satya Lancana Karyasatya pegawai;
- Pelayanan cuti pegawai.

Subbidang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

- Pelayanan Pensiun

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2016-2021) dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Namun demikian capaian-capaian tersebut diatas secara kelembagaan masih belum optimal yang disebabkan antara lain:

- Rendahnya profesionalisme PNS.
- Pengisian/penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada kompetensi.
- Penilaian kinerja belum objektif.
- Penerapan peraturan disiplin belum dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen .
- Persoalan-persoalan internal PNS lainnya.

Hal demikian nampak pada tingkat capaian terhadap sasaran dan tujuan Badan Kepegawaian Daerah yang telah ditetapkan dalam renstra. Untuk itu perlu kiranya beberapa kegiatan pembangunan khususnya dalam rangka mewujudkan sistem manajemen kepegawaian yang lebih berdayaguna sebagai landasan pembinaan dan pengembangan karir PNS perlu mendapatkan perhatian pada periode perencanaan jangka menengah lima tahun mendatang.

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2021-2024

NO	INDIKATOR	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
				(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	(n-2)	(n-1)	(n)	(n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional yang terisi sesuai kompetensi jabatan			60,00%	65,00%	68,00%	70,00%	75,00%	92,82%	75,00%	75,00%	
2	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN			5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	0,23%	0,45%	0,50%	0,50%	
3	Persentase data kepegawaian yang akurat			97,00%	98,00%	99,00%	55,60%	99,13%	0,00%	99,00%	99,00%	
4	Indeks Kepuasan Aparatur terhadap layanan kepegawaian			3,55	3,60	3,65	3,55	3,41	3,41	3,50	3,50	
5	Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	31,39%	36,25%	40,00%	50,00%	
6	Nilai Evaluasi Akuntabilitas kinerja			80	82	84	86	78,36	77,95	79	80	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi perangkat daerah.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2023, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kompetensi ASN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk mewujudkan ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul, jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

b. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Penempatan ASN sesuai dengan standar kompetensi jabatan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel bersih dan berwibawa menuju *good governance*. Permasalahan ini hendaknya menjadi salah satu perhatian Tim Penilai Kinerja (TPK).

c. Belum optimalnya penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang melanggar peraturan disiplin.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa disiplin aparatur masih lemah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh belum diterapkan peraturan disiplin di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan yang berlaku. Disiplin yang lemah menyebabkan hasil kinerja dan pelayanan yang seharusnya diberikan oleh seorang aparatur tidak akan maksimal. Hal ini

akan menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

- d. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Data pegawai yang lengkap dan *up to date* merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuai rencana yang disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan

- e. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu peningkatan guna mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan tepat.

Kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pelayanan di bidang administrasi kepegawaian merupakan salah satu kunci dalam mendorong terciptanya gairah aparatur dalam bekerja. Bila aparatur merasakan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dalam pembinaan dan pengembangan karirnya maka aparatur akan merasa lebih bersemangat untuk memberikan kinerja yang lebih baik karena yakin bahwa setiap yang telah dihasilkannya akan berbuah penghargaan atas apa yang telah diraihnya.

- f. Sarana dan prasarana kantor yang perlu peningkatan baik kualitas maupun kuantitas.

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor merupakan suatu syarat agar suatu organisasi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara baik dan lancar. Disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana kantor yang representatif juga mendorong untuk menciptakan lahirnya pelayanan yang lebih memuaskan bagi yang membutuhkan dan menimbulkan kenyamanan bagi yang menikmatinya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dijelaskan dengan tabel 2.3

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
BKPSDM Kabupaten Solok

Tabel 2.3											
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023											
BKPSDM Kabupaten Solok											
NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.....)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
I	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	68,00%	3.378.873.725	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Persentase Penempatan Aparatur Sesuai kompetensi	68,00%	3.378.873.725	
I.1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	85,00%	1.395.500.000	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN	85,00%	1.395.500.000	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	85,00%	80.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan	85,00%	80.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	85,00%	700.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	85,00%	700.000.000	
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	85,00%	151.500.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	85,00%	151.500.000	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	85,00%	200.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	85,00%	200.000.000	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	85,00%	151.500.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	85,00%	151.500.000	
	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	85,00%	112.500.000	Pengelolaan Data Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	85,00%	112.500.000	

I.2	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	72,00%	1.248.000.000	Mutasi dan Promosi ASN		Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan	72,00%	1.248.000.000
	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	72,00%	368.500.000	Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	72,00%	368.500.000
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	72,00%	217.500.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	72,00%	217.500.000
	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	72,00%	662.000.000	Pengelolaan Promosi ASN		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	72,00%	662.000.000
I.4	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%	223.500.000	Pengembangan Kompetensi ASN		Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100,00%	223.500.000
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100,00%	71.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	100,00%	71.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100,00%	152.500.000	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	100,00%	152.500.000
I.5	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pembinaan terhadap Aparatur	100,00%	511.873.725	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Persentase Pembinaan terhadap Aparatur	100,00%	511.873.725
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00%	74.873.725	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100,00%	74.873.725
	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100,00%	121.000.000	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	100,00%	121.000.000
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,00%	251.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	100,00%	251.000.000
	Pelayanan proses izin perceraian		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	100,00%	65.000.000	Pelayanan proses izin perceraian		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	100,00%	65.000.000

II	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	50,00%	9.747.531.556	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan)	50,00%	9.747.531.556	
II.1.	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00%	2.550.000.000	Pengembangan Kompetensi Teknis		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis	100,00%	2.550.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100,00%	2.550.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi jabatan Administrasi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	100,00%	2.550.000.000	
II.2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00%	7.197.531.556	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional		Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100,00%	7.197.531.556	
	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	100,00%	150.000.000	Penyusunan kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta jabatan Fungsional		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Serta Jabatan Fungsional	100,00%	150.000.000	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	100,00%	6.005.286.431	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	100,00%	6.005.286.431	
	- Pelatihan Kepemimpinan				4.387.053.836	- Pelatihan Kepemimpinan				4.387.053.836	
	- Pelatihan dasar CPNS				1.618.232.595	- Pelatihan dasar CPNS				1.618.232.595	
	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	100,00%	198.045.125	Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan		Jumlah Dokumen Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan	100,00%	198.045.125	
	- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi				198.045.125	- Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi				198.045.125	

III	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100,00%	8.400.740.475	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100,00%	8.400.740.475	
III.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100,00%	192.206.175	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah		Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	100,00%	192.206.175	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	6.363.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,00%	6.363.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100,00%	6.997.725	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00%	6.997.725	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	5.926.200	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100,00%	5.926.200	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	1.251.600	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100,00%	1.251.600	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	6.384.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100,00%	6.384.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	100,00%	162.170.400	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	100,00%	162.170.400	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	3.113.250	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	3.113.250	
III.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan	100,00%	7.556.031.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan	100,00%	7.556.031.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	7.552.300.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	7.552.300.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	2.184.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	100,00%	2.184.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	1.547.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100,00%	1.547.000	

III.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,00%	130.643.100	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	100,00%	130.643.100	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00%	26.397.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100,00%	26.397.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	77.849.100	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100,00%	77.849.100	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	26.397.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100,00%	26.397.000	
III.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100,00%	237.021.068	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran	100,00%	237.021.068	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100,00%	2.403.293	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100,00%	2.403.293	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan	100,00%	50.400.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Persediaan Kantor yang Disediakan	100,00%	50.400.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	16.253.475	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100,00%	16.253.475	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	8.591.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100,00%	8.591.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	138.373.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,00%	138.373.200	
	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		21.000.000	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		21.000.000	
III.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	100,00%	24.123.082	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah	100,00%	24.123.082	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	100,00%	2.205.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	100,00%	2.205.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100,00%	20.028.082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komusikasi, Sumber Daya Air dan listrik	100,00%	20.028.082	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan	100,00%	1.890.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayana Umum Kanotr yg disediakan	100,00%	1.890.000	

III.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	100,00%	260.716.050	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik	100,00%	260.716.050	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	135.450.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100,00%	135.450.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	72.607.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100,00%	72.607.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	45.203.550	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	45.203.550	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	7.455.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100,00%	7.455.000	
				TOTAL	21.527.145.756					21.527.145.756	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok bahwa BKPSDM Kabupaten Solok mempunyai kewenangan dalam bidang pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Solok Tahun 2022, usulan program dan kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok pada Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 tidak ada yang diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya. Rencana kerja dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Pendanaan Indikatif

No	Indikator Kinerja	Target	Pagu Indikatif
1	Persentase penempatan aparatur sesuai kompetensi	68%	Rp. 1.208.330.342
2	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	50%	Rp. 1.499.999.600
3	Persentase Pemenuhan Layanan Kesekretariatan	100%	Rp. 39.203.518.502
Jumlah			Rp. 41.911.848.444

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Anggaran Perubahan Tahun 2023 mengelola sebanyak 3 (Tiga) program, 11 (Sebelas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun program dan kegiatan yang dikelola Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Program sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah

Terdiri dari 4 kegiatan:

a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

dengan 6 sub kegiatan:

- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN

- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Mutasi dan Promosi ASN

dengan 3 sub kegiatan:

- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN

dengan 1 sub kegiatan:

- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

dengan 4 sub kegiatan:

- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan proses izin perceraian

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Terdiri dari 1 kegiatan:

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

dengan 1 sub kegiatan:

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan

3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

Terdiri dari 6 kegiatan

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

dengan 7 sub kegiatan:

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan 2 sub kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
dengan 5 sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan 4 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2023 dan Tahun 2024 secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
dan Prakiraan Maju Tahun 2024
BKPSDM Kabupaten Solok

Kode Rekening	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	PAGU RENJA TAHUN 2023 AWAL				PAGU RENJA TAHUN 2023 PERUBAHAN				Tambah/ Pengurangan	Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
03 02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan Aparatur Sesuai Kompetensi		100%	1.036.377.044			100%	1.208.330.342			
03 02 2 01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase kesesuaian Formasi Dengan Ketersediaan ASN		85%	312.728.516			85%	595.375.516			
03 02 2 01 02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Solok	1 Dokumen	73.610.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Dokumen	358.697.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	285.087.000	
03 02 2 01 03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK"	Kab. Solok	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	
03 02 2 01 06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN"	Kab. Solok	275 Dokumen	48.070.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	275 Dokumen	48.070.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	
03 02 2 01 08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kab. Solok	1 Lembaga	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Lembaga	100.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	
03 02 2 01 10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Solok	7 Dokumen	42.478.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	7 Dokumen	40.038.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(2.440.000)	
03 02 2 01 11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Solok	150 Dokumen	48.569.916	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	150 Dokumen	48.569.916	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	

03	02	2	02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase kesesuaian kompetensi dengan jabatan		72%	529.557.812			72%	446.528.110			
03	02	2	02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Solok	500 Dokumen	82.868.848	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	500 Dokumen	81.748.946	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(1.119.902)
03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Solok	800 Dokumen	54.499.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	800 Dokumen	52.167.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(2.332.000)
03	02	2	02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Solok	500 Dokumen	392.189.964	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	500 Dokumen	312.612.164	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(79.577.800)
03	02	2	03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian		100%	17.958.500			100%	17.958.500			
03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Solok	10 Orang	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	10 Orang	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	02	2	03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Kab. Solok	394 Orang	17.958.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	394 Orang	17.958.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	02	2	04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pembinaan terhadap Aparatur		100%	176.132.216			100%	148.468.216			
03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Solok	1 Dokumen	23.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Dokumen	15.974.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(7.026.000)
03	02	2	04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Solok	300 Orang	53.221.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	300 Orang	53.221.900	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	02	2	04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Solok	4 Laporan	80.910.316	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	4 Laporan	60.272.316	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(20.638.000)
03	02	2	04	09	Pelayanan proses izin perceraihan Pegawai yang Dilayani	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Solok	2 Dokumen	19.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Dokumen	19.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0

04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS Tidak termasuk Guru dan Tenaga Kesehatan		100%	1.499.999.600	9.747		100%	1.499.999.600	-		
04	02	2	02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Kelulusan Aparatur Yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			1.499.999.600	-			1.499.999.600	-		
04	02	2	02	03	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Kab. Solok	30 orang	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	30 orang	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
					- Uji Kompetensi dan sertifikasi jabatan fungsional (P2UPD, Pol PP dan barang Jasa)										
					- Uji Kompetensi dan sertifikasi Pemerintahan dan teknis										
04	02	2	02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Solok	3 Laporan	1.499.999.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	3 Laporan	1.499.999.600	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
					- Pelatihan Kepemimpinan				-				-		
					- Pelatihan dasar CPNS				-				-		

03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Layanan Kesejahteraan		100%	30.741.656.278			100%	39.203.518.502			
03	01	2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		100%	152.134.704			100%	148.462.704			
03	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Solok	7 Dokumen	6.059.740	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	7 Dokumen	6.059.740	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Solok	2 Dokumen (RKA, RAK)	6.664.370	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Dokumen (RKA, RAK)	2.992.370	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(3.672.000)
03	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Solok	2 Dokumen (RKA-P, RAK- P)	5.642.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Dokumen (RKA- P, RAK-P)	5.642.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	Kab. Solok	2 Dokumen (DPA, RUP)	1.191.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Dokumen (DPA, RUP)	1.191.750	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DKA-SKPD	Kab. Solok	2 Dokumen (DPA-P, RUP- P)	6.069.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Dokumen (DPA- P, RUP-P)	6.069.250	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Solok	12 Laporan (Lapsik & keu)	123.543.094	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	12 Laporan (Lapsik & keu)	123.543.094	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Solok	4 Laporan (Evaluasi RKPD Triwulan)	2.964.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	4 Laporan (Evaluasi RKPD Triwulan)	2.964.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0

03	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kesesuaian Pertanggungjawaban Keuangan dengan Aturan		100%	30.060.438.326			100%	38.571.309.935			
03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Solok	487 Orang/Bulan	30.052.704.826	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	487 Orang/Bulan	38.568.888.435	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	8.516.183.609
03	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Solok	1 Laporan	6.186.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Laporan	874.500	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(5.312.000)
03	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Solok	1 Dokumen	1.547.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Dokumen	1.547.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	56.496.000			100%	56.496.000			
03	01	2	05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Solok	2 Orang	12.530.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Orang	12.530.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Solok	360 Orang	43.966.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	360 Orang	43.966.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Solok	50 Orang	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	50 Orang	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran		100%	161.105.810			100%	140.961.810			
03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Solok	2 Paket	2.854.610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Paket	2.854.610	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Peralatan Kantor yang Disediakan	Kab. Solok	3 Paket	38.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	3 Paket	38.250.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Solok	4 Paket	17.436.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	4 Paket	17.436.200	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0

03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Solok	12 Paket	7.476.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	12 Paket	7.476.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	
03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Solok	37 Laporan	95.089.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	37 Laporan	74.945.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(20.144.000)	
03	01	2	06	10	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Solok	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Dokumen	-	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	
03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Urusan penunjang Pemerintah Daerah		100%	19.668.644			100%	21.065.259			
03	01	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat	Kab. Solok	1 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Laporan	1.000.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	
03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Kab. Solok	24 Laporan	16.868.644	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	24 Laporan	18.265.259	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	1.396.615	
03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yg disediakan	Kab. Solok	1 Laporan	1.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 Laporan	1.800.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	
03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur Yang Berfungsi dengan baik		100%	291.812.794			100%	265.222.794			
03	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Solok	2 unit	160.317.632	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 unit	141.727.632	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(18.590.000)	
03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Solok	2 Unit	88.283.382	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	2 Unit	80.283.382	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	(8.000.000)	

03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Solok	1 unit	36.111.780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	1 unit	36.111.780	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
03	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kab. Solok	10 Unit	7.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kab. Solok	10 Unit	7.100.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0
JUMLAH									33.278.032.922				41.911.848.444		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja perangkat daerah ini disusun untuk menjadi pedoman dalam perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok, sehingga tujuan dan sasaran yang diharapkan akan tercapai sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Solok.

Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2023 harus menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil yang ditargetkan.

Mengingat akan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, akan ada potensi rencana kerja yang sudah tertuang ke dalam Dokumen Renja tidak dapat direalisasikan. Sehingga perlu dilakukan evaluasi target capaiannya di kemudian hari. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang kedalam Renja, perlu dilakukan koordinasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat sehingga hasilnya dapat sesuai dengan sasaran yang diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf BKPSDM Kabupaten Solok.

Demikian Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Solok ini dibuat untuk dijadikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat.

Arosuka, Juni 2023

KEPALA



AFRIALDI, SE, MM

NIP. 19750429 199403 1 002